

Ayo KPK Bersihkan Kabupaten Malang dari Korupsi!

Pada hari senin 8 oktober Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap sejumlah tempat di Kabupaten Malang. Mulai dari pendopo kabupaten malang yang di dalanya terdapat kantor bupati dan kantor BPKAD, rumah dinas bupati dan rumah pribadi Bupati Malang. Kedatangan KPK dapat dipastikan terkait dengan dugaan korupsi yang sedang ditangani oleh KPK di Kabupaten Malang.

Kedatangan KPK di Kabupaten Malang bak angin penyegar ditengah mandulnya penegakan hukum terhadap dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Malang. Publik Kabupaten Malang tentu berharap KPK dapat membuka tabir korupsi yang selama ini tertutupi dan ditutupi oleh oknum pejabat di Kabupaten Malang. Sehingga akan semakin jelas dan terbukti bahwa selama ini Kabupaten Malang sedang tidak baik-baik saja.

Malang Corruption Watch sesungguhnya tidak kaget atas pengeledahan yang dilakukan oleh KPK di Kabupaten Malang. Hal tersebut didasarkan dari hasil monitoring dan advokasi sejumlah dugaan korupsi yang telah terjadi dari tahun ketahun. Berikut beberapa dugaan korupsi yang patut menjadi perhatian KPK:

1. Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

a. Jalan dan Jembatan

Pengadaan jalan dan jembatan di Kabupaten Malang dari tahun 2015-2017 ditemukan sejumlah persoalan:

- Terdapat beberapa nama kontraktor bermasalah. Pertama, Modus menang secara berulang oleh beberapa kontraktor yaitu TPA (6x), SP (2x), WP (4x), KIM (2x) dan KJAC (4x); Kedua, dugaan potensi masalah pengadaan yang bersumber dari opentender.net (Situs monitoring PBJ), dimana terdapat nama-nama kontraktor dengan skor tertinggi yang bermasalah dalam pengadaan barang dan jasa di kabupaten malang, yaitu PT TPA, CV CCU, CV EPT, CV BM dan CV AR.
- Terdapat kekurangan volume pengerjaan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur. Temuan kekurangan Volume Pekerjaan tersebut sebesar Rp. 1.064.168.859,42 (1 Milyar lebih) atas 11 (sebelas) paket pengerjaan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Malang selama tahun 2014-2016. Dimana pengerjaannya dilakukan oleh kontraktor yang sering mendapatkan atau memenangkan proyek di Kabupaten Malang.

b. Pembangunan Pasar sumedang

Selain Pengadaan Jalan dan Jembatan, terdapat indikasi korupsi juga pada Pembangunan Pasar di Kabupaten Malang. Salah satu Pembangunan Pasar yang bermasalah di Kabupaten Malang adalah Pembangunan Pasar Sumedang. Beberapa persoalannya adalah:

- Pembangunan tidak kunjung selesai padahal sudah dimulai sejak tahun 2013. Pembangunan tersebut telah menelan dana sebesar 35 M. hal ini

mengindikasikan adanya pemborosan (jika bukan penyelewengan) anggaran pembangunan.

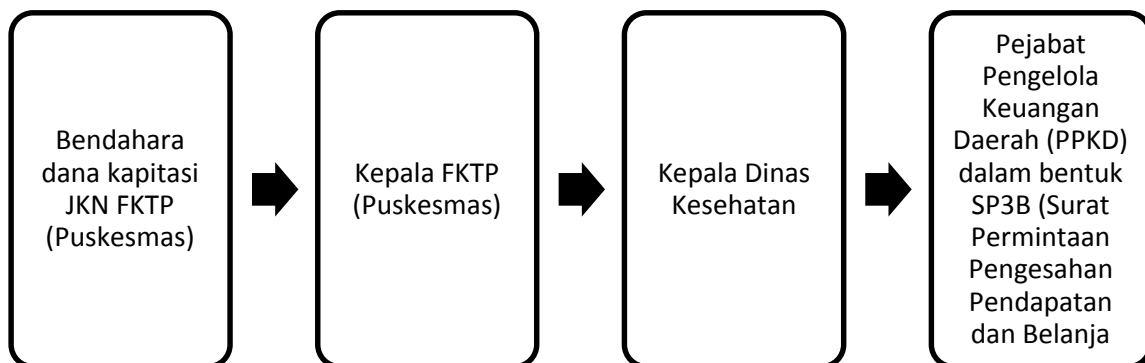
- Adanya temuan kekurangan volume pengerjaan dari hasil audit BPK Jawa Timur. Pada tahun 2013, audit BPK menyatakan secara jelas bahwa terjadi kekurangan volume atas pekerjaan pembangun Pasar Sumedang Tahap 1 dengan nominal sebesar 47.985.678 Juta.
- Kontraktor bermasalah. Nama kontraktor yang bermasalah pada Pengadaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Malang juga mengerjakan Pasar Sumedang. Berikut adalah nama-nama kontraktor tersebut: TPA pada tahun 2013-2014, SP pada tahun 2015, KIM pada tahun 2016 dan SP pada tahun 2017.

2. Dugaan Korupsi Dana Kapitasi

Dugaan Korupsi Dana Kapitasi di Kabupaten Malang perlu menjadi perhatian KPK, meskipun sebelumnya Tim Saber Pungli Polda Jatim telah melakukan OTT terhadap bendahara salah satu puskesmas di Kabupaten Malang. Beberapa hal yang patut menjadi perhatian atas OTT tersebut adalah:

Pertama, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yang terkena OTT “hanyalah” bendahara Puskesmas. Bendahara Puskesmas berada pada level terendah dalam tingkatan pengelola dana kapitasi. Artinya selain tidak menyentuh akar persoalan, nominal korupsi dana kapitasi bendahara Puskesmas juga terbilang kecil.

Kedua, jika terjadi penyimpangan penggunaan dana kapitasi, tentu akan bermasalah dalam proses pelaporan penggunaan. Jika lolos dalam pelaporan berarti ada tindakan pembiaran (jika bukan keterlibatan) dari stakeholder di atasnya. Berikut adalah gambaran alur pelaporan dana kapitasi:



Sumber: Pasal 3 Perpres No. 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN, diolah MCW

Ketiga, korupsi dana kapitasi di Puskesmas Karangploso sudah dilakukan selama beberapa tahun dan besar kemungkinan Kepala Dinas mengetahui. Ditambah lagi, pernyataan Bupati Malang bahwa sudah melakukan sidak sebelumnya dengan Wakil Bupati Malang. Jika demikian, seharusnya Bendahara Puskesmas Karangploso sudah diberhentikan dan mendapat sanksi tegas. Kenyataannya adalah tidak, sampai kita semua tahu telah terjadi OTT yang dilakukan Polda Jatim. Dari argumentasi tersebut, bisa disimpulkan bahwa ada indikasi pembiaran (jika bukan keterlibatan) dari pejabat di atasnya.

KPK sesungguhnya dapat melakukan koordinasi dan supervisi untuk mengembangkan dugaan penyalahgunaan kewenangan atas dana kapitasi di Kabupaten Malang. Berikut rincian dana kapitasi dari tahun ketahun:

No	Tahun	Anggaran Dana Kapitasi
1	2014	33,184,354,000.00
2	2015	58,285,931,756.00
3	2016	64,431,810,000.00
4	2017	64,504,462,000.00
5	2018	67,376,619,859.00

Sumber: APBD Kabupaten Malang, diolah MCW

Terdapat dugaan pemotongan sebesar 5% dari dana kapitasi oleh oknum pejabat di internal Pemerintah Kabupaten Malang pada setiap bulan. Jika diakumulasikan setidaknya terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp 2-4 Miliar/tahun.

3. Dugaan Korupsi Sumber Daya Alam

Dugaan Korupsi dan Maladministrasi perizinan tambang Pasir Besi Wonogoro. Pertambangan tersebut terletak di Kawasan Hutan Lindung sehingga terindikasi bermasalah, dengan deskripsi sebagai berikut:

Pertama, terbitnya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atas nama (inisial) K dan N pada tahun 2012 terindikasi terdapat dugaan Korupsi. Terbitnya IPR tersebut, telah melanggar UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Kedua, dengan terbitnya IPR untuk Pertambangan Pasir Besi Wonogoro, padahal melanggar Undang-undang tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa terdapat indikasi Korupsi dalam proses perizinan.

Ketiga, Pada 2014 Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis potensi kerugian tambang di Kabupaten Malang mencapai Rp600 miliar. Diperkuat dengan pernyataan dari Polres Malang yang menyebut ada mafia tambang di Kabupaten Malang.

4. Dugaan Korupsi Pengelolaan Aset

Pengelolaan Aset milik pemerintahan Kabupaten Malang tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal tersebutlah yang menjadi dasar munculnya sejumlah persoalan dalam pengelolaan aset di kabupaten Malang. Misalnya ditangkapnya oknum kepala desa atas dugaan korupsi tanah desa di Kabupaten Malang.

Selain itu, terdapat temuan dalam LHP-BPK tahun 2008 kabupaten Malang, menjelaskan bahwa pencatatan aset tetap kantor dan gedung kantor pada neraca Per 31 Desember 2008 pemerintah Kabupaten Malang yang merupakan hasil tukar menukar dengan pihak ketiga belum didukung dengan bukti formal yang memadai.

Karena tidak memiliki dasar hukum yang sah sehingga mengakibatkan Pencatatan nilai tanah Rp1.532.558.674,00 dan bangunan Rp12.964.237.957,00 pada neraca per 31 Desember 2008 Pemkab Malang belum mempunyai kepastian

hukum yang kuat serta Pelaksanaan perjanjian tukar menukar tanah dan bangunan aset antara Pemkab Malang dengan pihak swasta (PT ACA) tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Dugaan Korupsi Penggunaan DAK

Dana alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.

Berikut rincian dana Kapitasi yang didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Malang:

No	Tahun	Realisasi (DAK)
1	2010	Rp88.658.700.000
2	2011	Rp108.468.200.000
3	2012	Rp118.237.360.000
4	2013	Rp112.312.350.000
5	2014	Rp130.050.580.000
6	2015	Rp153.350.440.000
7	2016	Rp468.164.701.980
8	2017	Rp506.688.726.785

Sumber: MCW, diolah dari berbagai sumber

Data di atas menunjukkan terdapat tren peningkatan DAK dari tahun ke tahun. Kenaikan drastis terjadi pada tahun 2016 dan 2017.

Sedangkan rincian anggaran dengan alokasi DAK terbesar (5 besar) adalah:

No	Sektor/OPD	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bidang Pendidikan	Rp 51.8 M	Rp 71.7 M	Rp 72 M	Rp70.3 M	Rp 68.3 M	Rp 57.5 M	Rp 266.4 M	Rp 398.2 M
2	Bidang kesehatan	Rp 10.7 M	Rp 12.7 M	Rp 5.1 M	Rp 5.4 M	Rp 7.5 M	Rp 19.1 M	Rp 79.1 M	Rp 47.6 M
3	Bidang Infrastruktur Jalan	Rp 7.5 M	Rp 6.2 M	Rp 9 M	Rp 9 M	Rp 9.3 M	Rp 14.6 M	Rp 50.1 M	Rp 21.9 M
4	Bidang Infrastruktur Irigasi	Rp 4.5 M	Rp 4.4 M	Rp 7.7 M	Rp 5.1 M	Rp 8.9 M	Rp 13.8 M	-	Rp 13 M
5	Bidang pertanian	Rp 5.8 M	Rp 7.4 M	Rp 7.5 M	Rp 6.5 M	Rp 13.1 M	Rp 32.7 M	Rp 37.2 M	Rp 752 jt

Sumber: MCW, diolah dari berbagai sumber

Dari 5 bidang yang mendapatkan DAK, Bidang pendidikan menjadi bidang dengan realisasi DAK terbesar, disusul bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang infrastruktur jalan/jembatan dan terakhir bidang infrastruktur Irigasi.

Dugaan penyelewengan anggaran DAK terjadi di beberapa bidang, terutama terkait proses pengadaan barang dan jasanya. Misalnya: DAK pendidikan terkait dengan pengadaan barang dan jasa (pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah).

Berdasarkan catatan di atas, Malang Corruption Watch bersama dengan warga kabupaten Malang medesak:

- 1. KPK segera menetapkan tersangka terhadap dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Malang**
- 2. KPK mendalami dugaan korupsi di Kabupaten Malang, termasuk mencari aktor intelektual dibalik korupsi yang terjadi di Kabupaten Malang**
- 3. MCW dan Warga Kabupaten terus mendukung upaya KPK dalam melakukan pemberantasan Korupsi di Kabupaten Malang**
- 4. APH (Kepolisian dan Kejaksaan) meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pemberantasan Korupsi di Kabupaten Malang**

CP. Afif Mukhlisin/Divisi Korupsi Politik MCW/No telp. 083834485117